



## *Pencegahan Patologi Birokrasi Melalui Reformasi Administrasi Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta)*

Nabila Hidayah<sup>1</sup>, Evi Priyanti<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

<sup>2</sup>Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

---

### Abstract

Received:

Revised:

Accepted:

*This paper examines the avoidance of bureaucratic disease through the reform of public sector management using the Purwakarta Regency Environmental Service as a case study. This research was conducted to assess the public service administration performance of the Purwakarta Regency Environmental Service workers. This study employs a qualitative methodology. Qualitative research is a kind of inquiry that generates descriptive data in the form of written inner speech and observable behavior from the subjects themselves. By employing a qualitative methodology, it is possible to build and strengthen a theory, as well as collect facts and information linked to the avoidance of bureaucratic disease. This study indicates that the Purwakarta Regency Environmental Service lacks oversight, resulting in public service maladministration, as well as a loss of public confidence, resulting in a decline in public satisfaction with the delivery of public services.*

**Keywords:** Pathology, work productivity

(\*) Corresponding Author: [1910631180026@student.unsika.ac.id](mailto:1910631180026@student.unsika.ac.id)

**How to Cite:** Hidayah, N., & Priyanti, E. (2022). Pencegahan Patologi Birokrasi Melalui Reformasi Administrasi Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(20), 344-352. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7243080>

---

## PENDAHULUAN

Birokrasi merupakan alat yang sangat penting bagi masyarakat. Kewajiban negara untuk memajukan kesejahteraan warganya diwujudkan dalam birokrasi. Oleh karena itu, negara harus berpartisipasi secara aktif dalam menyediakan barang dan jasa publik yang dibutuhkan warganya. Untuk memenuhi persyaratan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 1, negara menciptakan struktur administrasi yang bertujuan untuk melayani kepentingan warga negaranya.

Pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik, disebut birokrasi. Bukan rahasia lagi bahwa birokrasi Indonesia memberi kesan kepada publik bahwa menyelesaikan urusannya dengan aparat pemerintah membutuhkan proses yang berbelarut-larut dan berbelit-belit. Akibatnya, birokrasi secara konsisten menerima reputasi buruk yang merugikan pertumbuhannya sendiri (terutama dalam pelayanan publik). Percakapan publik sekarang berpusat pada permintaan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di lingkungan pemerintahan umumnya terdapat beberapa realita sehari-hari yang sering kita jumpai, seperti proses kerja yang melelahkan, sering terlihat file berserakan, beban kerja yang tidak seimbang yang



dibebankan pada satu orang sehingga memperlambat proses kerja, dan lain sebagainya. Pelayanan yang kurang memuaskan kepada masyarakat merupakan gejala penyakit birokrasi. Harus diakui bahwa tidak ada birokrasi yang sepenuhnya bebas dari berbagai penyakit yang terkait dengan birokrasi. Namun, tidak ada birokrasi yang mengalami semua penyakit birokrasi sekaligus. Setiap orang dalam birokrasi rentan terhadap penyakit birokrasi, yang tentu saja sangat bervariasi dan sangat sulit untuk diobati. Hal ini dapat dilihat sebagai tuntutan dan masalah bagi pemerintah di masa depan. Birokrasi pemerintah tidak hanya menghadapi persoalan, tetapi seluruh masyarakat yang mengalami transformasi di bidang politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat juga akan menghadapi hambatan. Oleh karena itu, harapan masyarakat terhadap birokrasi yang semakin aksesibel, transparan, produktif, serta mampu memberikan dan meningkatkan kualitas layanannya akan semakin tumbuh di tahun-tahun mendatang.

Dalam hal seperti ini, tindakan aparatur negara harus benar-benar mengabdikan pada kepentingan negara dan negara, sehingga birokrasi harus tunduk pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Karyawan masih jauh dari menjadi profesional di industri, yang merupakan kenyataan lain saat menawarkan layanan kepada masyarakat. Ketika ada individu yang membutuhkan bantuan, mereka sering diabaikan. Sebelum meminta bantuan, masyarakat harus bertanya terlebih dahulu. Bahkan ada beberapa orang yang terpaksa harus pulang karena kebutuhannya tidak terpenuhi dan tidak bisa mendapatkan pelayanan. Hal ini disebabkan kurangnya buku panduan yang menggambarkan dan merinci langkah-langkah, praktik, dan biaya layanan. Dalam praktiknya, kita sering melihat pekerja menyalahgunakan kekuasaan dan posisinya untuk menerima suap dan melakukan nepotisme. Staf dan bahkan kepala kantor, yang menjalankan bisnis apa pun yang diinginkan, menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan dan posisi. Realitas pelaksanaan tugas pelayanan administrasi lingkungan, seperti penyalahgunaan wewenang dan praktik administrasi yang buruk, adalah isu yang ada saat ini. Berdasar dari uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pencegahan Patologi Birokrasi Melalui Reformasi Administrasi Pelayanan Publik (Studi Kasus pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta)”.

Suatu kondisi yang dikenal sebagai patologi birokrasi mempengaruhi birokrasi negara dan disebabkan oleh tindakan birokrat serta faktor-faktor politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknis yang menciptakan keadaan yang menguntungkan untuk itu. Gejala-gejala patologi birokrasi antara lain “pengecualian yang berlebihan, kepatuhan terhadap aturan atau rutinitas – rutinitas dan proses, penolakan terhadap perubahan, dan desakan kecil pada hak kekuasaan dan posisi” menurut Victor A Thompson (Irfan, 2014). Berbagai penyakit yang mungkin sudah atau mengancam akan menyerang birokrasi pemerintah negara bagian harus diidentifikasi untuk menemukan terapi pengobatan yang paling efisien. Hanya dengan begitu mereka akan mampu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul, baik yang bersifat politik, ekonomi, sosial budaya, maupun teknologi (Siagian, 2010). 2018)

Jurnal penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih detail jenis-jenis patologi birokrasi yang ada di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Purwakarta, serta bagaimana cara menghindarinya dan apa yang akan terjadi jika oknum tersebut melanggar hukum. Akibatnya, penulis mengembangkan sejumlah rumusan masalah untuk membantu perdebatan.

1. Bagaimana gaya manajerial di dalam Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta ?
2. Bagaimana cara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta untuk meningkatkan produktivitas kerja para pegawainya ?
3. Apa saja potensi pelanggaran - pelanggaran yang mungkin terjadi pada birokrasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta ?
4. Bagaimana strategi pencegahan terhadap potensi pelanggaran tersebut dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta ?
5. Apa saja sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan peraturan dalam prosedur birokrasi ?

Hasil diharapkan atau tujuan penelitian dalam kajian ini diantaranya sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui gaya manajerial di dalam Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.
2. Untuk mengetahui cara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta untuk meningkatkan produktivitas kerja para pegawainya.
3. Untuk mengetahui potensi pelanggaran - pelanggaran yang mungkin terjadi pada birokrasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.
4. Untuk mengetahui strategi pencegahan terhadap potensi pelanggaran tersebut dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.
5. Untuk mengetahui apa saja sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan peraturan dalam prosedur birokrasi.

## **METODE**

Metodologi kualitatif digunakan untuk penelitian ini. Penelitian kualitatif adalah metode yang mengumpulkan data deskriptif, seperti pikiran dan tindakan orang-orang yang berpartisipasi dalam penelitian. Menurut penelitian (Agusta, 2003), Menurut Taylor dan Bogdan, penyelidikan saat ini memberikan akun unidimensional dari keadaan saat ini. Para peneliti juga ingin memberikan data deskriptif yang dapat diamati tentang perilaku dan bahasa verbal dan tertulis. Dalam penelitian ini, kami mengumpulkan informasi melalui tiga cara: melalui observasi langsung, wawancara, dan pemeriksaan dokumen yang relevan. Untuk mendeskripsikan Pencegahan Patologi Birokrasi Melalui Reformasi Administrasi Pelayanan Publik pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan wawancara mendalam dan pemeriksaan dokumen terkait.

Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat teori dan mengumpulkan data dan informasi tentang Pencegahan Patologi Birokrasi Menggunakan Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta melalui metode kualitatif.

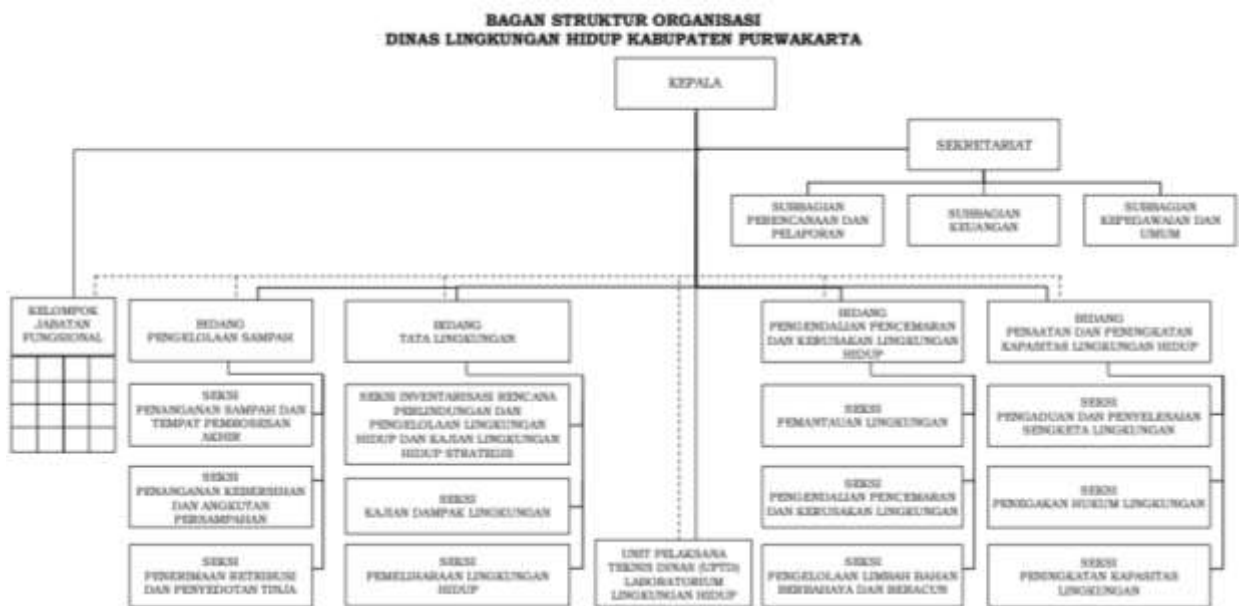
Penelitian ini menggunakan teori patologi birokrasi, yang mendefinisikan patologi birokrasi sebagai “penyakit dalam birokrasi negara yang muncul sebagai akibat dari perilaku birokrat dan kondisi yang membuka peluang untuk itu” termasuk faktor politik dan ekonomi sebagai serta sosial, budaya, dan teknologi. Menurut

(Siagian, 2018), patologi dalam birokrasi memanifestasikan dirinya melalui lima indikator berikut: manifestasi disfungsi atau negatif dalam perilaku birokrat; persepsi tentang gaya manajerial pejabat birokrasi; rendahnya pengetahuan dan keterampilan petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional; tindakan pejabat yang melanggar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan persepsi pejabat birokrasi terhadap pelanggaran norma dan peraturan.

## HASIL & PEMBAHASAN

### Manajerial

Gaya kepemimpinan manajer pada Dinas Lingkungan Hidup Purwakarta menggunakan jalan demokratis. Pada gaya kepemimpinan ini, keputusan yang diambil menggunakan pilihan mayoritas yang didapat dari beberapa sub bidang dalam organisasi ini.



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta (DLHK, 2020)

Akibatnya, semakin kuat dan kokoh anggota tim mempertahankan ide atau tujuan mereka, semakin besar kemungkinan ide tersebut akan diadopsi. apalagi jika usulan tersebut dipilih oleh mayoritas. Gaya kepemimpinan demokratis dapat memperpanjang proses pengambilan keputusan, tetapi memiliki manfaat yang akan terlihat ketika anggota tim dan manajer harus menghadapi masalah yang benar-benar menantang. Setiap anggota tim akan menyumbangkan pemikiran dan ambisi brilian mereka dengan menggunakan pendekatan ini, yang akan menghasilkan penyelesaian masalah yang sangat baik dan efisien. Tampaknya beralasan bahwa semakin otak mempertimbangkan solusi masalah, akan semakin baik.

### Produktivitas Kerja

Pemerintah sebagai penyedia layanan publik bertanggung jawab dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, maka dari itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta membuat suatu indikator agar kinerjanya dapat berjalan dengan maksimal yang tertuang dalam Indikator Kinerja Umum sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Program
1	Meningkatkan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya alam dan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang disusun (dok)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulasi perhitungan : Jumlah dokumen lingkungan hidup yang diselesaikan (RTH, IKLH, Adipura &amp; Sekolah Budaya Lingkungan )</li> <li>- Tipe perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>- Sumber data : Lap. Akhir Bidang Konservasi &amp; Rehabilitasi Sumber Daya Alam, (Tata Lingkungan ) Bid. Pencegahan dampak Lingkungan &amp; Bid. Informasi &amp; Kemitraan Lingkungan. ( Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup)</li> </ul>	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
2	Meningkatkan Pengamanan Sumber Mata Air	Presentase Mata Air yang diamankan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulasi perhitungan : Jumlah titik mata air yang diamankan / Titik mata air yang ada x 100</li> <li>- Tipe perhitungan : Kumulatif</li> <li>- Sumber data : Lap. Akhir Bidang Konservasi &amp; Rehabilitasi Sumber Daya Alam</li> </ul>	Pengamanan Mata Air
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup	Waktu Penyelesaian Perijinan Lingkungan Hidup (hari)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulasi perhitungan : Jumlah hari dalam penyelesaian perijinan LH</li> <li>- Tipe perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>- Sumber data : Lap. Akhir Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan</li> </ul>	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
4	Menurunkan Beban Pencemaran Lingkungan dan Meningkatkan Baku Mutu Lingkungan	Jenis Kualitas Lingkungan Yang Dipantau (jenis)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulasi perhitungan : Jumlah titik pantau dari jenis pengukuran kualitas lingkungan : 1. Kualitas Air 2. Kualitas Udara 3. Kualitas Tanah</li> <li>- Tipe perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>- Sumber data : Lap. Akhir Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah</li> </ul>	Pemantauan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
5	Meningkatnya Penaatan dan Penegakan Hukum Serta Penyelesaian Sengketa Lingkungan	Presentase Pengaduan dan Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulasi perhitungan : (Jumlah pengaduan hukun LH yang diselesaikan/Jumlah pengaduan) x 100 %</li> <li>- Tipe perhitungan : Kumulatif</li> <li>- Sumber data : Lap. Akhir Bidang Informasi dan Kemitraan Lingkungan</li> </ul>	Penyadaran dan Penegakan Hukum Lingkungan
6	Meningkatnya Penataan Keindahan dan Kebersihan lingkungan	Presentase penanganan sampah yang diselesaikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulasi perhitungan : (Jumlah volume sampah yang ditangani/jumlah volume produksi sampah) x 100 %</li> <li>- Tipe perhitungan : Non Kumulatif</li> <li>- Sumber data : Lap. Akhir Bidang Pengelolaan Persampahan</li> </ul>	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Gambar 2. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta (DLHK, 2020)

Namun faktanya, menurut keluhan masyarakat, layanan yang ditawarkan seringkali kurang pengetahuan dan sosialisasi kepada masyarakat sehingga mereka menyadari perlunya menjaga lingkungan selain perusahaan yang mereka kembangkan. Sebagai konsumen layanan publik, masyarakat umum tidak puas dengan keadaan ini karena mereka tidak yakin dengan informasi yang harus mereka dapatkan. Karena semua itu, masyarakat tidak mau berurusan dengan birokrasi pemerintah karena dianggap rumit dan mahal.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu instansi pemerintah yang berfungsi memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Jenis pelayanan yang ditawarkan antara lain Upaya Pengelolaan Lingkungan, yang terkait dengan pengurusan izin pengelolaan lingkungan (UPL).

Menurut temuan awal di Dinas Lingkungan Hidup Purwakarta, beberapa masalah yang dialami oleh dinas pelayanan. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kualitas pelayanan adalah sosialisasi pelayanan. Oleh karena itu, salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah sosialisasi pelayanan kepada pelaku perusahaan atau masyarakat. Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta dirasakan masih perlu adanya sosialisasi tentang inisiatif membangun lingkungan hidup yang layak dan sehat bagi pelaku usaha.

Pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta masih kurang memperhatikan masalah lingkungan di sana, yang merupakan persoalan lain yang masih sering dilontarkan oleh oknum tertentu. Pada kenyataannya, pengelolaan lingkungan Kabupaten Purwakarta di bawah standar karena banyak lokasi, termasuk pasar dan tujuan wisata, masih jauh dari bersih.

### **Patologi**

Menurut (Trisianto, 2018), maladministrasi merupakan salah satu jenis penyakit atau penyakit dalam pelayanan publik karena menyangkut praktik-praktik yang menyimpang dari etika administrasi atau yang menjauhkan administrasi dari tujuannya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia mendefinisikan maladministrasi sebagai “perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, melampaui wewenang, atau menggunakan wewenang untuk tujuan selain yang dimaksudkan; atau yang menunjukkan kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintah, yang mengakibatkan materi dan/atau immateri masih terdapat kekosongan bidang pekerjaan yang dilakukan oleh pejabat pada instansi terkait, seperti dalam penyelenggaraan usaha yang sah. Salah satu kelemahannya adalah masyarakat sering menyuap pegawai birokrat di Badan Lingkungan Hidup untuk menerbitkan surat UPL-UKL yang harus dimiliki oleh pelaku usaha, tetapi dilakukan secara tidak sah. Cara yang melanggar tata tertib instansi itu sendiri. Akibatnya birokrat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta dan pemilik perusahaan kekurangan gambaran lengkap tentang perubahan birokrasi.

### **Pencegahan**

Upaya mengatasi patologi birokrasi itu sendiri pada hakekatnya adalah memberikan pelayanan masyarakat yang luar biasa, yang mewujudkan tanggung jawab pekerja publik di pemerintahan. Namun keadaan yang ada di masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan administrasi publik khususnya yang berkaitan dengan pembuatan surat UPL-UKL belum berjalan secara efektif dan masih terdapat beberapa kesalahan dalam penerapannya. Tentang inisiatif penanggulangan patologi administrasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.

Praktik maladministrasi di atas yang merupakan salah satu contoh patologi birokrasi di Indonesia, sering terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di negara tersebut. Menurut pengalaman peneliti, praktik administrasi yang buruk dapat terjadi akibat pertemuan tatap muka dan diperparah oleh kurangnya pengetahuan tentang perubahan birokrasi di kalangan profesional layanan dan

masyarakat umum. Menurut penulis, ketiga elemen ini sangat penting untuk mencegah praktik maladministrasi secara keseluruhan:

- Telah terjadi perubahan administrasi yang meluas. Ini berarti bahwa reformasi administrasi memerlukan lebih dari sekedar mengubah personil, mengganti nama lembaga tertentu, atau mengurangi atau merampingkan birokrasi; itu juga memerlukan reformasi yang kurang terlihat seperti meningkatkan profesionalisme birokrat, meningkatkan moral mereka, dan mengubah perspektif mereka bahwa birokrasi adalah alat untuk kepentingan publik daripada untuk keuntungan pribadi.
- Penciptaan otoritas hukum dan undang-undang tertentu. Kejahatan, terutama yang ada di birokrasi, seperti halnya penyakit, sangat dipengaruhi oleh wibawa hukum.
- Membangun sistem yang transparan dan akuntabel. Ketiadaan demokrasi dan rasa akuntabilitas di dalam birokrasi membuat birokrat lebih mudah menyimpang dari tindakan yang seharusnya. Alat untuk mendorong keterbukaan dan akuntabilitas adalah pemantauan, baik dari bawah maupun dari atas. Penerapan e-government diharapkan dapat mendorong keterbukaan dan meningkatkan akuntabilitas pejabat. Pelayanan yang menawarkan bantuan atau solusi kepada setiap orang dalam masyarakat yang mengalami masalah merupakan salah satu ciri pelayanan yang bertanggung jawab. Solusi yang ditawarkan adalah yang paling user-friendly karena memberikan pelanggan informasi yang mereka butuhkan, membantu mereka dalam melakukan tugas segera, dan tidak mengenakan biaya tambahan untuk layanan tambahan. Menghilangkan budaya pengguna layanan cukup menantang. Alangkah baiknya jika petugas menolak permintaan tip dari pengguna jasa dengan menyatakan bahwa kegiatan yang diminta adalah kewajiban. Karena itu, administrasi publik harus mengakui keberadaan birokrasi sebagai pelayan publik dan keberadaan konsumen jasa sebagai tuannya.

### **Sanksi**

Sanksi untuk para pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta yang melakukan praktik maladministrasi sudah tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS, sanksi inipun tidak memandang jabatan apa yang dipegang orang tersebut, apabila ia melakukan pelanggaran maka harus menerima konsekuensinya.

Presiden Joko Widodo telah memperbarui aturan bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Aturan ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Peraturan ini telah ditandatangani Presiden pada 31 Agustus 2021 yang akan melengkapi Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Adapun aturan ini memuat mengenai kewajiban, larangan serta hukuman disiplin bagi PNS yang tidak menaati kewajiban atau melanggar larangan yang telah ditetapkan.

### **CONCLUSION**

Kesimpulan dalam penelitian yang ditarik dari pembahasan ini berdasar dari bentuk patologi birokrasi yang ditemukan di Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Purwakarta, yakni (1) Masih adanya praktek maladministrasi yang termasuk ke dalam patologi atau penyakit birokrasi di dalam tubuh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta seperti penyuaipan agar surat UKL-UPL dapat dikeluarkan walaupun usaha tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ada, serta kurangnya kesadaran akan arti reformasi pelayanan public dari masyarakat pelaku usaha maupun pegawai pelayanan tersebut, (2) Pencegahan dari praktik maladministrasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta yaitu dengan cara diperketatnya pengawasan antar pegawai itu sendiri serta meningkatkan jiwa integritas pada pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, (3) Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta masih kurang optimal. Banyak keluhan dari masyarakat tentang sosialisasi terhadap masyarakat pelaku usaha agar mereka paham akan pentingnya menjaga lingkungan hidup disamping usaha yang mereka bangun, serta kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta masih kurang responsif terhadap permasalahan lingkungan hidup di sana karena masih ada beberapa tempat di Kabupaten Purwakarta kenyataannya dianggap jauh dari kata bersih.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti mengajukan beberapa saran, diantaranya (1) Seluruh elemen baik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta maupun masyarakat pelaku usaha harus sadar akan reformasi pelayanan publik serta sadar akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar salah satunya dengan mengurus seluruh persyaratan - persyaratan yang telah diberikan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta. Segala persyaratan yang ada di dalam aturan tersebut wajib dipatuhi dengan baik karena hal tersebut dampaknya kepada kelangsungan hidup seluruh umat manusia. (2) Bentuk pencegahan patologi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta pada dasarnya sudah cukup baik, namun untuk lebih memperketat pengawasan di sini masyarakat harus dilibatkan terhadap jalannya pelayanan public tersebut dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. (3) Sebaiknya pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta dapat menyebarkan brosur tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup sekitar disertai Standar Operasional Pelayanan cara pembuatan surat UKL-UPL agar masyarakat pelaku usaha mengetahui prosedur pengurusannya dan agar tidak menimbulkan kesan yang berbelit-belit serta meningkatkan responsivitas keluhan keluhan dari public terkait lingkungan hidup.

### **REFERENCES**

- Agusta, I. (2003). Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif. *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor*.
- DLHK. (2020). Dinas Lingkungan Hidup. *Dinas Lingkungan Hidup*, 6, 0–96.
- Irfan, S. (2014). *Rekonstruksi Birokrasi Pemerintahan Daerah*. [https://books.google.co.id/books?id=LYgpDwAAQBAJ&lpg=PA162&ots=-nui4bcrBM&dq=\(Irfan Setiawan%2C 2014 %3A115\)&lr&hl=id&pg=PA2#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=LYgpDwAAQBAJ&lpg=PA162&ots=-nui4bcrBM&dq=(Irfan+Setiawan%2C+2014+%3A115)&lr&hl=id&pg=PA2#v=onepage&q&f=false)
- Siagian, S. P. (2018). *Patologi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik (Studi Pelayanan*



- Pembuatan E-Ktp Di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tapung TAHUN 2016). *JOM FISIP*, 5, 1–15.
- Trisianto, M. I. (2018). Patologi Birokasi Dalam Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Pembuatan E-Ktp Di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tapung Tahun 2016). *Jom Fisip*, 5(3), 1–15.